

Perempuan Parlemen dan Agenda Pembangunan Inklusif

Oleh: Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si

Anggota DPR-RI 2019-2024

Latar Belakang Pembangunan Inklusif

- Pembangunan yang kapitalistik selama ini telah mengancam keberlanjutan sistem sosial dan ekosistem lingkungan secara keseluruhan
- Pendekatan pembangunan yg terlalu berorientasi kepada pertumbuhan, telah menghasilkan **eksklusi** sosial dan tiga krisis besar, berupa: ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat **inklusif**.
- Karena itu pembangunan inklusif menjawab tiga krisis tersebut ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Sebenarnya Pembangunan Inklusif adalah elemen SDGs

- **No one left behind** adalah slogan SDGs yang populer sebab dipengaruhi oleh pembangunan inklusif sebagai anti thesis dari pembangunan sebelumnya yang mengeklusi orang.
- **Elemen SDGs**
 - **People**, memastikan semua orang hidup bermartabat, dan setara
 - **Planet**, pembangunan tidak boleh merusak lingkungan
 - **Prosperity**, pembangunan harus mensejahterakan semua orang
 - **Peace**, negara harus menciptakan suasana damai, tanpa kekerasan dan bebas dari rasa takut
 - **Partnership**, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, keterlibatan semua pihak menjadi penting - pemerintah defisit pelaksanaan dan deliveri, CSO defisit skala, perusahaan defisit reputasi

Keadilan Substantif

sejauh mana kebijakan atau program mampu menjawab
kebutuhan warga



Keadilan Prosedural

sejauh mana warga terutama kelompok yang tertinggal
terlibat dalam proses dan pelaksanaan pembangunan
inklusif



Pembangunan Inklusif

- Wirotomo (2015) model pembangunan inklusif adalah suatu bentuk model pembangunan sosial yang paling mutakhir. Pada model pembangunan sosial ini harus menggunakan pendekatan yang tidak bersifat sektoral dan ekonomi semata
- Meski mekanisme pembangunan memberi budget secara sektoral (ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya), tetapi secara makro dapat digambarkan pembangunan terjadi arah ke pembangunan holistic karena pembangunan diletakkan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan, dan masyarakat sebagai modal sosial.
- Tujuan dari pembangunan inklusif adalah membangun kualitas kehidupan sosial budaya (social cultural quality of life), dan komponen yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kualitas kehidupan sosial budaya antara lain struktur sosial, kultur, dan proses sosial.

Ketimpangan Sosial Pada Perempuan

- Ketimpangan sosial yang terburuk salah satunya dihadapi kaum perempuan.
- Padahal, secara asset, akibat pembangunan yang kapitalistik kepemilikan perempuan juga sangat menyedihkan.
- Contoh: Berdasarkan data BPN 2016 menunjukkan hanya 15,88% dari 44 juta bidang tanah yang teridentifikasi dimiliki oleh perempuan.
- Bahkan, berdasarkan data Solidatiras Perempuan, di Desa Sei Ahas Kalimantan Tengah tidak ada surat tanah yang dikeluarkan oleh Desa atas nama perempuan. Sementara di Desa Barati, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, perbandingan penguasaan tanah di Barati sendiri masih didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan 90:10.

Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Afirmasi

- Parlemen secara teoritis adalah representasi rakyat yang dipilih melalui sistem demokrasi melalui pemilu yang dijalankan secara regular.
- Pembicaraan pokok dalam membicarakan sistem demokrasi bekerja adalah mencari representasi yang adil atas **komposisi demografis dan komposisi geografis**. Secara teknokratis dijabarkan melalui sistem BPP dan DAPIL.
- Namun, hal itu tidak cukup, representasi yang adil dalam demokrasi tidak sepenuhnya dapat dihasilkan dari persaingan bebas pemilu. Maka, ada “rekayasa” yang memungkinkan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang rentan seperti perempuan, buruh, kelompok minoritas, mendapatkan kesempatan agar duduk di parlemen. Karena itu, *positive action* seperti kuota terhadap perempuan, sistem terbuka atau tertutup adalah tata cara yang sah jika ditujukan untuk membuat demokrasi semakin substantive.

Perempuan di DPR RI

- Ketua DPR RI Perempuan.
- Total terdapat 575 anggota DPR –RI 2019-2024
- Dari 575 anggota DPR tersebut, 457 orang laki-laki dan 118 orang perempuan.
- Artinya, secara prosentase jumlah anggota DPR laki-laki sebanyak 80 persen dan perempuan sebanyak 21 persen.
- Hal tersebut meningkat sebesar 22 persen dari Pemilu 2014 lalu, pada saat itu anggota DPR perempuan hanya 97 orang.

Mendorong Legislasi Inkusif

- Perempuan parlemen harus mendorong kebijakan pembangunan inklusif dengan tujuan menjawab tiga krisis besar, berupa: ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan.
- Mendorong lahirnya regulasi yang menjamin pembangunan inklusif
- Memberikan perlindungan kepada perempuan RUU PKS